

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD DKI Sebut Biro Dikmental Tak Profesional

◆ Susun Anggaran Dana Hibah

JAKARTA (Poskota) - DPRD DKI menyoroti kinerja Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta yang tidak profesional, kurang peka, dan tidak bijak dalam menyusun anggaran. Pasalnya, besaran anggaran dana hibah untuk organisasi keagamaan yang diterima oleh PWNU DKI menunjukkan kerja mereka berantakan.

"Menurut saya, ini menunjukkan tidak peka dan tidak bijak serta tidak profesionalnya Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam menentukan besaran anggaran untuk or-

ganisasi masyarakat dan keagamaan," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Sutikno, Rabu (23/11).

Dalam draf RAPBD yang diajukan oleh Biro Dikmental DKI Jakarta, kata Sutikno, awalnya MUI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp33 miliar dan menuliskan besaran anggaran untuk disetujui Rp12,1 miliar. Lalu PWNU DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp38 miliar dan disetujui Rp4 miliar. Muhammadiyah mengajukan anggaran Rp8 miliar disetujui Rp3 miliar.

Penentuan besaran anggaran yang disusun oleh Biro Dikmental DKI Jakarta ini, menurut H. Sutikno dari awal belum pernah dikonsultasikan dengan anggota dewan.

"Terus terang saya terkejut, karena ini menunjukkan bahwa Biro Dikmental DKI Jakarta tidak profesional dan tidak bijak dalam penyusunan anggaran, jika melihat besaran proposal yg diajukan dengan rincian kegiatan yg disusun oleh pemohon dana hibah. Mengapa bedanya, kok terlalu jauh. Nah, ini yang aneh," tutur Sutikno.

Kemudian, menurut Sutikno, setelah pembahasan

RAPBD tahun 2023 di Komisi E antara Eksekutif dan Legislatif, kemudian ditetapkan besaran anggaran menjadi masing-masing untuk MUI sebesar Rp15,7 miliar, PWNU DKI Jakarta mendapatkan Rp5 miliar, dan Muhammadiyah mendapat dan hibah Rp4 miliar.

Padahal, tertulis dalam rencana kegiatan, kegiatan NU DKI Jakarta yang menaungi enam cabang (PCNU), 44 MWC (Pengurus di Tingkat Kecamatan), 267 ranting (Pengurus di Kelurahan), 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota di Jakarta, dengan beragam pelatihan

dan penguatan bela negara perlu mendapat apresiasi.

Maka dari itu, Sutikno melihat sangat relevan jika anggaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta bisa direvisi dalam rapat anggaran (Banggar) menjadi minimal Rp10 miliar.

"Saya memahami keberatan PWNU DKI Jakarta soal besaran dana hibah ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan Rapat Banggar besar di DPRD DKI Jakarta sore ini, besaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta dalam RAPBD 2023 bisa direvisi dan dinaikkan menjadi minimal Rp 10 miliar," tandas Sutikno. **(Aldi/lfm)**